



# PENGADILAN TINGGI JAWA BARAT

Jalan Cimuncang No. 21D Bandung CP. 40125

Telp. (022) 87832124 Fax (022) 87832125

Website : [www.pt-bandung.go.id](http://www.pt-bandung.go.id),

Email : [info@pt-bandung.go.id](mailto:info@pt-bandung.go.id)

## LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI JAWA BARAT

Nomor : W11.U/ 38 /KP.11.01//2018

### TENTANG PEMBENTUKAN TIM SURVEI INDEKS KEPUASAN PELANGGAN/MASYARAKAT PADA PENGADILAN TINGGIJAWA BARAT

No.	Nama	Jabatan	Jabatan dalam SK	Keterangan
1.	H. Arif Supratman, SH., MH.	Wakil Ketua	Ketua Tim	
2.	Drs. Subarji, SH.	Sekretaris	Sekretaris	
3.	Drs. Barnas, SH.	Kabag Perencanaan dan Kepegawaian	Anggota	
4.	Hj. Iin Mutmainah, SH., MH.	Panmud Hukum	Anggota	
5.	Anton Senjaya, S.kom., SH.	Staf Kepaniteraan Hukum	Anggota	
6.	Epi Apriandi P., Amd.	Staf Subag Kepegawaian dan TI	Anggota	

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal : 3 Januari 2018

KETUA PENGADILAN TINGGI JAWA BARAT

ARWAN BYRIN



# PENGADILAN TINGGI JAWA BARAT

Jalan Cimuncang No. 21D Bandung CP. 40125

Telp. (022) 87832124 Fax (022) 87832125

Website : [www.pt-bandung.go.id](http://www.pt-bandung.go.id),

Email : [info@pt-bandung.go.id](mailto:info@pt-bandung.go.id)

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PEMBENTUKAN TIM SURVEI INDEK KEPUASAN PELANGGAN/ MASYARAKAT PADA PENGADILAN TINGGI JAWA BARAT
- Pertama : Membentuk Tim Survei Indeks Kepuasan Pelanggan/Masyarakat pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat dengan target pencapaian IKM tahun 2017 sebesar **82 (Delapan puluh dua)**.
- Kedua : Tim Survei Kepuasan Pelanggan/Masyarakat pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat bertugas melakukan Survei Kepuasan Pelanggan/Masyarakat dan Melaporkan kepada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.
- Ketiga : Menugaskan kepada yang nama-namanya tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai Tim Survei Indeks Kepuasan Pelanggan/Masyarakat pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat
- Keempat : Salinan Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
- Kelima : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan bahwa, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal : 3 Januari 2018

KETUA PENGADILAN TINGGI JAWA BARAT

ARWAN BYRIN



# PENGADILAN TINGGI JAWA BARAT

Jalan Cimuncang No. 21D Bandung CP. 40125

Telp. (022) 87832124 Fax (022) 87832125

Website : [www.pt-bandung.go.id](http://www.pt-bandung.go.id),

Email : [info@pt-bandung.go.id](mailto:info@pt-bandung.go.id)

## KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI JAWA BARAT

Nomor :W11.U/ **38** /KP.11.01//2018

TENTANG

PEMBETUKAN TIM SURVEI INDEKS KEPUASAN PELANGGAN/MASYARAKAT  
PDA PENGADILAN TINGGI JAWA BARAT

KETUA PENGADILAN TINGGI JAWA BARAT

- Menimbang :
1. Bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan, maka perlu melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik;
  2. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam nomor 1, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi dan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung mengeluarkan peraturan tentang pedoman survei kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik;
  3. Bahwa dengan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam nomor 1, 2 dan 3 dianggap perlu untuk membentuk Tim Survei Indeks Kepuasan Pelanggan/ Masyarakat sebagai mana yang dimaksud diatas.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas KKN.
  2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5038)
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009;
  4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
  5. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 076/KMA/Skruiil2009 tentang Pedoman Pelaksana Pelanggaran Pengaduan di Lingkungan Lembaga
  6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial Nomor 014/KMA-NY/Stf/2009 tentang Pedoman Pelayanan Informasi pada Mahkamah Agung RI
  7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

- Memperhatikan :
1. Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI tanggal 13 April 2016 Nomor 520/DJU/PS.OU4|2016 perihal Survei Indeks Kepuasan Masyarakat.
  2. Surat Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI tanggal 4 Mei 2016 Nomor 608/DJU/PS0?5/2016 perihal Survei Indeks Kepuasan Masyarakat